

EFEKTIVITAS MEDIA *E-GOVERNMENT* DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI INFORMASI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Zulfahmi¹, Muhammad Badri², Listiawati Susanti³

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, ³Program Studi Bimbingan Konseling Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: zulfahmi14011996@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan artikel ini untuk mengetahui efektivitas media *e-government* dalam mendukung transparansi informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu memberi gambaran tentang bagaimana efektivitas media *e-government* dalam mendukung transparansi informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Informan terdiri atas empat orang pejabat dan staf bagian Humas dan dua orang masyarakat yang mengakses informasi. Artikel ini menemukan website www.riau.kemenag.go.id sebagai media *e-government* sangat efektif dan efisien dalam mendukung transparansi informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui fasilitas-fasilitas *website* tersebut yang memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dengan sangat cepat, murah, dan transparan, serta dapat dilihat dari umpan baliknya yang positif.

Dengan transparansi informasi melalui media *website* tersebut maka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, kalangan bisnis, instansi/ lembaga dan para pegawai tentang Kementerian Agama Provinsi Riau dapat diakses dengan mudah dan tidak perlu menunggu berhari-hari. Faktor penghambat penggunaan *website* sebagai media *e-government* dalam mendukung transparansi informasi hanya terletak pada SDM dan jaringan internet. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu tersedianya jaringan internet serta sarana dan prasarana yang memadai.

Kata kunci: Efektivitas, *E-government*, Media, Teknologi Informasi, Transparansi

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat berkembang hampir di seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Era globalisasi yang menuntut masyarakat bergerak cepat dan dinamis serta bertindak efektif dan efisien dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat membuat teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian canggih sangat diperlukan keberadaannya. Hal ini membuat beberapa segmentasi kehidupan masyarakat perlahan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, diantaranya sektor perdagangan, produksi barang dan jasa, pendidikan, keamanan, sosial, politik, termasuk dalam bidang pemerintahan.

Internet menjadi media yang sangat vital untuk mendukung kemajuan/perkembangan dan menjadi media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas serta menjadi alat komunikasi yang paling cepat, tepat, efektif dan efisien. Searah dengan kondisi tersebut, pada saat ini pemerintah telah menggalakkan pemanfaatan teknologi informasi (internet) dalam menunjang aktifitas kegiatan pemerintahannya. Pemanfaatan internet ini dalam pemerintahan disebut dengan *Electronic Government*. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholders*)

dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik secara efektif, efisien dan terbuka¹.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan diwujudkan dengan sebuah sistem yang disebut dengan *e-government* atau *electronic government*. *E-government* merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. Kebutuhan akan tersedianya informasi setidaknya memiliki sifat-sifat informasi yang cakupannya luas, mudah digunakan, terkini, aman, serta murah.²

E-Government tidak hanya memberikan pelayanan publik tetapi juga membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *E-Government* memang menggunakan internet berbasis teknologi untuk menjalankan bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Pada level pelayanan, *E-Government* menjanjikan pelayanan 24 jam dan seminggu penuh serta kemudahan akses. Selain itu *E-Government* juga berfungsi sebagai alat demokrasi yang dilakukan secara online dengan memberikan laporan dan informasi pemerintah yang kadang kala hal tersebut sulit untuk didapatkan dan juga bisa mengadakan debat secara *online*.³

Bagi pemerintah, internet digunakan melalui website pemerintah. Karena *website* memberikan banyak manfaat diantaranya dapat meningkatkan personal brand (nama baik) bagi pemilik website. Website merupakan sebuah halaman di internet yang memuat informasi teks, gambar, animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya.⁴

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui *website*, adalah salah satu sarana yang harus dimanfaatkan oleh badan pemberi informasi, karena melalui website, pemerintah dengan gampang menyebarkan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Karena itu, pemerintah diharapkan untuk lebih transparan dalam memberikan informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yakni untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan/murah, dan cara sederhana. Informasi publik itu sendiri mencakup semua jenis informasi yang dikelola lembaga – lembaga publik, sedangkan lembaga publik meliputi seluruh penyelenggara Negara pada level eksekutif, legislatif, dan yudikatif di semua tingkat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara. Termasuk juga organisasi nonpemerintah atau swasta yang menggunakan dana pemerintah, atau yang mempunyai perjanjian kerja dengan pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik.⁵

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau sebuah instansi yang besar dan memiliki banyak cabang yang ada dibawahnya seperti Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama yang memiliki khalayak yang luas dan tersebar diberbagai daerah sekitar provinsi Riau. Untuk itu penggunaan website sebagai media penunjang transparansi informasi sangat penting sekali, karena dengan menggunakan media online

¹ Nova Yohana et al., “Pengelolaan Website Sebagai E-Government Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakat”, Dalam <http://Repository.unri.ac.id/>, (diakses 26 November 2017)

² *Sistem informasi dalam berbagai perspektif* (Bandung : Informatika Bandung. 2006) Cetakan pertama, 85.

³ Falih Suaedi Dan Bintoro Wardiyanto (Ed), *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi Dan E-Governance* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 91.

⁴ Dadan. *Kreatif Membuat Website Profesional Tanpa Ribet, Tanpa Biaya* (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 2.

⁵ Heri Budianto dan Farid Hamid (ed), *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*.(Jakarta:Kencana, 2011), 419.

kegiatan komunikasi akan lebih efektif dan mudah dilakukan walaupun perbedaan lokasi sangat jauh dan lebih efisien dalam hal biaya dan waktu.

Untuk mendukung kinerja unit pengelola informasi public harus didukung oleh sumber daya manusia berkualitas yang didukung oleh tersedianya fasilitas teknologi komunikasi-informasi yang memadai. Faktor lain yang harus menjadi perhatian adalah merubah karakter yang memamat-mamat sebagai kelas dominan menjadi pelayan publik di bidang pemenuhan informasi kepada media massa maupun masyarakat pada umumnya sebagai pengguna informasi. Tersedianya unit pengelola informasi publik dan sumber daya manusia, fasilitas memadai yang efisien dengan kecepatan yang memadai, maka badan pemerintah diharapkan dapat menyediakan informasi yang akurat untuk kepentingan media massa⁶.

Dengan permasalahan tersebut bagaimana efektivitas media e-government ini mampu memberikan kemudahan, kepraktisan, dan efisiensi biaya dan waktu guna mendukung transparansi informasi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas media *e-government* dalam mendukung transparansi informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Metode

Metode penelitian artikel ini deskriptif kualitatif yaitu memberi gambaran tentang bagaimana efektifitas media *e-government* dalam mendukung transparansi informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 235, Kota Pekanbaru pada Desember 2017- Februari 2018. Informan penelitian terdiri atas empat orang pejabat dan staf bagian Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan dua orang masyarakat yang mengakses informasi.

Hasil dan Pembahasan

E-Government merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintah.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk lebih mempromosikan efisien dan hemat biaya, memudahkan layanan pemerintah yang lebih mudah, memungkinkan akses publik yang lebih besar terhadap informasi, dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada warga negara.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:⁷

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

⁶ Ibid. Hlm. 347

⁷ Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), 36

5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi

Kebutuhan akan informasi yang realtime sudah menjadi kebutuhan utama dimana akses informasi tersebut tidak hanya diperoleh melalui komputer (PC), namun bisa juga diakses melalui laptop, handphone dan gadget yang terbaru melalui jaringan internet. Saat ini hampir semua Kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah telah mempunyai website.

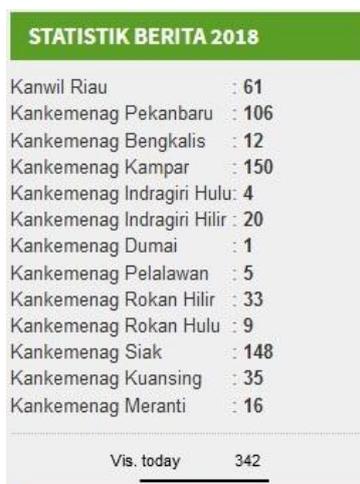
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dapat diketahui Efektivitas Media E-Government dalam mendukung transparansi informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

1. Government To Citizen

Government To Citizen merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan.

Sebenarnya banyak informasi yang harus diketahui publik, atau bahkan di internet Kementerian dan lembaga sendiri perlu informasi tersebut. Publik perlu tahu apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan ? apakah hal tersebut menguntungkan atau melibatkan masyarakat? Artinya website Kementerian Agama Provinsi Riau harus melakukan publikasi informasi secara aktif.

Berdasarkan data yang telah disajikan dari hasil wawancara dengan keempat informan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau bahwa *Government to Citizen* melalui website www.riau.kemenag.go.id merupakan suatu upaya yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Riau untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disajikan di website diperbarui secara berkala, publikasi informasi dilakukan secara aktif, serta segala informasi dan data disediakan secara transparan tanpa ditutup-tutupi. Penyampaian informasi dari *Government to Citizen* ini sangat efektif dan transparan, karena informasi dan data yang disajikan pada website dengan domain www.riau.kemenag.go.id ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Dilihat dari banyaknya pengunjung yang mengunjungi website, dan banyak yang melakukan feedback melalui e-mail ataupun dengan yang lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan Kementerian Agama.⁸



STATISTIK BERITA 2018	
Kanwil Riau	: 61
Kankemenag Pekanbaru	: 106
Kankemenag Bengkalis	: 12
Kankemenag Kampar	: 150
Kankemenag Indragiri Hulu	: 4
Kankemenag Indragiri Hilir	: 20
Kankemenag Dumai	: 1
Kankemenag Pelalawan	: 5
Kankemenag Rokan Hilir	: 33
Kankemenag Rokan Hulu	: 9
Kankemenag Siak	: 148
Kankemenag Kuansing	: 35
Kankemenag Meranti	: 16
Vis. today	342

Gambar 1. Visit Today (jumlah pengunjung tanggal 13 Februari 2018)

⁸ Hasil wawancara dengan keempat informan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Tuntutan masyarakat modern adalah bahwa pemerintah harus memiliki waktu response yang cepat terhadap berbagai permintaan atau kebutuhan khalayak. Dengan kata lain, masyarakat tidak peduli bagaimana pemerintah mengorganisasikan dirinya, namun yang penting adalah bahwa semua proses pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diberikan secara baik, cepat dan murah.⁹

Selain melalui website www.riau.kemenag.go.id, Informasi dan Humas (INMAS) Kementerian Agama Provinsi Riau juga aktif menggunakan Youtube dan Facebook sebagai media dalam menyebarkan Informasi.



Gambar 2. Halaman Youtube Kanwil Kemenag Provinsi Riau (Tanggal 21 Februari 2018)

Youtube Kemenag Provinsi Riau memiliki Subscriber sebanyak 296 *Subscriber*. Dengan jumlah Viewers yang beragam. Informasi-informasi yang disajikan melalui Youtube sangat aktif. Berdasarkan hasil observasi penulis, setiap hari informasi-informasi yang diupload ke youtube selalu diperbarui, baik itu informasi dari INMAS sendiri maupun Informasi dari 12 Kabupaten Kota se-Provinsi Riau serta informasi yang berkaitan dengan Kementerian Agama Provinsi Riau. Seluruh kegiatan yang dilakukan Kanwil Kemenag Riau disajikan secara transparan dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun.



Gambar 3. Halaman Facebook Kanwil Kemenag Riau (Tanggal 21 Februari 2018)

⁹ Richardus Eko Indrajit, *Elektronik Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, (Yogyakarta: Andi, 2006), 86

Berdasarkan hasil observasi penulis, sebagai website dinamis Facebook Kanwil Kemenag Riau diikuti oleh 674 orang, dengan memiliki informasi yang selalu berubah-ubah dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Informasi-informasi yang disajikan pada halaman Facebook ini juga sama halnya dengan youtube yaitu sangat aktif dan transparan.

Menurut analisa penulis *Government to Citizen* merupakan penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Penyampaian informasi kepada masyarakat secara keseluruhan sangat efektif, ditandai dengan banyaknya informasi pada website www.riau.kemenag.go.id ini yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan mudah, cepat dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi.

2. Government To Business

Government to Business Adalah suatu tipe hubungan interaksi pemerintah dengan lingkungan bisnis. Karena sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik, antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Tujuannya demi kemudahan berbisnis bagi kalangan pembisnis.



Gambar 4. Halaman LPSE Kementerian Agama RI

Transparansi sebuah proyek *e-Government* sangat erat kaitannya dengan keberadaan stakeholder, dalam arti kata bahwa harus selalu tersedia seluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang sedang berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh stakeholder yang beragam tersebut. Tersedianya akses terhadap informasi semacam status proyek, alokasi sumber daya, evaluasi per tahap proyek, dan lain sebagainya bertujuan untuk menciptakan kredibilitas dan legitimasi yang baik bagi para penyelenggara proyek maupun stakeholder sebagai pihak yang melakukan monitoring. Dimungkinkannya pihak-pihak yang berkepentingan mengakses data dan informasi terkait dengan proyek yang sedang berlangsung, secara tidak langsung merupakan sarana pemasaran yang cukup efektif, karena disana terlihat keseriusan pemerintah untuk selalu memberikan yang terbaik untuk rakyatnya melalui implementasi beragam proyek *e-Government*.¹⁰

¹⁰ Richardus Eko Indrajit, *Elektronik Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, (Yogyakarta: Andi, 2006), 66



Gambar 5. Halaman Kategori Berita dan Media website Kemenag Riau

Berdasarkan data yang disajikan dari hasil wawancara dengan keempat informan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau bahwa website Kemenag Riau Sebenarnya saat ini untuk pebisnis hanya menyampaikan informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan Kementerian Agama. Seperti travel haji dan umroh, kementerian Agama tidak mengkomersilkan travelnya tapi hanya menyampaikan daftar nama travel yang sudah di verifikasi oleh haji Kementerian Agama, meliputi masalah-masalah dan informasi mengenai travel haji umroh, serta kendala-kendala yang ada di travel umroh. Untuk pebisnis yang masuk dalam pemberitaan website sifatnya hanya pemberitaan saja. Kalau untuk bisnis keluar tidak ada, tapi kalau untuk proyek-proyek ada, Seperti pada proyek pengadaan secara elektronik, karena yang berkaitan dengan bisnis sudah disediakan didalam sistem LPSE dan SIRUP.¹¹

Menurut analisa penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau bahwasanya Government to Business sangat efektif dan transparan karena merupakan penyampaian informasi bisnis kepada kalangan bisnis melalui sistem LPSE dan SIRUP, Semua informasi pengadaan disajikan secara terbuka atau transparan.

3. Government To Government

Government to Government merupakan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk memperlancar kerjasama antar departemen atau lembaga pemerintahan.



Gambar 6. Halaman Kategori Regulasi website Kemenag Riau

¹¹ Hasil wawancara dengan keempat informan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Hampir setiap hari para birokrat dipemerintah harus mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan negara yang bersangkutan. Produk-produk formal seperti kebijakan, regulasi, peraturan pemerintah, undang-undang, keputusan, pertimbangan, dan lain sebagainya yang merupakan output dari lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dibuat berdasarkan kajian terhadap berbagai data dan informasi terkait. Dapat dibayangkan betapa sulitnya dan betapa buruknya kualitas pengambilan keputusan yang ada jika tidak didasarkan pada kebenaran data atau informasi yang akurat dan berkualitas. Faktor kecepatan memperoleh data/informasi terkini juga menjadi isu utama yang kerap menghalangi pemerintah untuk bersikap proaktif. Jelas dalam kaitan ini terlihat pentingnya keberadaan teknologi informasi sebagai sarana strategis sekaligus penunjang utama proses penyelenggaraan pemerintah yang efektif.¹²

Berdasarkan data yang telah disajikan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang menjadi informan penelitian, dapat diketahui bahwa informan mengatakan website Kemenag Riau menyediakan berbagai informasi online yang dibutuhkan bagi lembaga pemerintah lainnya. Melalui website ini maka lembaga/instansi lain dapat dengan mudah dalam mencari informasi berkenaan Kementerian Agama. Penyampaian Government to Government sudah efektif dan transparan, hal ini dilihat dari umpan balik yang dilakukan oleh instansi/lembaga lain yang sangat positif, mereka sangat terbantu dengan kemudahan yang diberikan dalam mendapatkan informasi dan data berkaitan dengan Kemenag Riau melalui website.

4. Government To Employee

Government to Employee merupakan penyampaian informasi dan interaksi antara pemerintah dengan karyawan, aplikasi *e-government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini antara lain :¹³

- a. Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintah.
- b. Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan yang merupakan hak dari pegawai pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak-hak individualnya;
- c. Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintah yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan dan lain-lain) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya;
- d. Aplikasi yang dapat membantu karyawan pemerintah dalam membantu untuk melakukan perencanaan terhadap aspek finansial keluarganya termasuk didalamnya masalah tabungan dan dana pensiun; dan lain sebagainya

¹² Richardus Eko Indrajit, *Elektronik Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, (Yogyakarta: Andi, 2006), 98

¹³ Richardus Eko Indrajit, *Elektronik Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, (Yogyakarta: Andi, 2006), 44-45



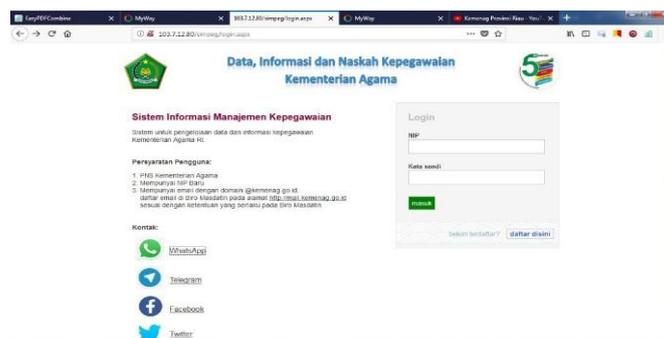
Gambar 7. Halaman E-MPA (Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran).



Gambar 8. Halaman SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Kementerian Agama)

Pusat Layanan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Kemenag merupakan lanjutan dari program Padamu Negeri yang dirintis oleh Kemdikbud sejak 20 Mei 2013 hingga Juni 2015. Mulai 17 Agustus 2015, Kemenag mengembangkan secara mandiri Layanan SIM PTK Online berbasis sistem SIAP Padamu Negeri bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia. Melalui Layanan SIM PTK Online ini, Kemenag mengembangkan beragam program kerja untuk kepentingan PTK Kemenag, meliputi: Digitalisasi Portofolio PTK, Bantuan/Beasiswa PTK, Tunjangan PTK, Diklat PTK, Sertifikasi PTK, Pemetaan Mutu PTK, dan beragam program lainnya.

Proses transaksi data pada Layanan SIM PTK Online Kemenag akan melibatkan secara berjenjang dari individu PTK, Pimpinan Madrasah/Sekolah, Kantor Kemenag Kab/Kota, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi, hingga Unit-Unit Kerja Kemenag Pusat dengan terpadu.



Gambar 9. Halaman Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Berdasarkan data yang telah disajikan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang menjadi informan penelitian, dapat diketahui bahwa informan mengatakan penyampaian informasi *government to employeeed* sudah efektif dan transparan. Para pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau diberikan berbagai kemudahan dalam mendapatkan informasi melalui aplikasi E-MPA, SIMPATIKA dan SIMPEG. Salah satunya yaitu informasi-informasi yang disajikan diwebsite www.riau.kemenag.go.id ini, juga disajikan melalui media sosial WhatsApp dan Facebook, serta dalam menyebarkan informasi terkini atau *breaking news* kita gunakan *voice* melalui *speaker* yang terkoneksi ke setiap ruangan, sehingga dengan adanya sarana dan prasarana inilah yang dapat mendukung transparansi informasi kepada para pegawai.¹⁴

Menurut analisa penulis *Government to Employeeed* merupakan proses penyampaian informasi kepada para pegawai, dalam hal ini *website* menjadi sebagai media *e-government* dalam menyampaikan pesan kepada para pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Penggunaan aplikasi pelayanan pemerintah kepada para pegawai seperti SIMPEG, E-MPA dan SIMPATIKA sudah efektif dan transparan. Dengan adanya website ini maka para pegawai dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan informasi dan pelayanannya. Penggunaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor pendukung transparansi informasi kepada para pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Salah satunya yaitu INMAS (Informasi dan Humas) menggunakan *speaker* sebagai media penyampaian informasi terkini yang terkoneksi kesetiap ruangan. Hal ini sangat efektif dalam proses penyampaian pesan kepada para pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Simpulan

Dari analisa data yang disajikan pada bab sebelumnya yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti secara keseluruhan mengenai Efektivitas Media E-Government Dalam Mendukung Transparansi Informasi Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa efektivitas Media e-Government dalam mendukung transparansi Informasi Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau adalah dengan penggunaan website www.riau.kemenag.go.id sebagai media e-Government sangat efektif dan efisien dalam mendukung transparansi informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Hal ini dapat dilihat dari kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui fasilitas-fasilitas website tersebut yang memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dengan sangat cepat, murah, dan transparan, serta dapat dilihat dari umpan baliknya yang positif. Keempat tipe relasi *e-government* yaitu *government to citizen*, *government to business*, *government to government* dan *government to employeeed* secara keseluruhan sudah efektif dan transparan dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Dengan transparansi informasi melalui media website tersebut maka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, kalangan bisnis, instansi/lembaga dan para pegawai tentang Kementerian Agama Provinsi Riau dapat diakses dengan mudah dan tidak perlu menunggu berhari-hari.

Faktor penghambat penggunaan website sebagai media *e-government* dalam mendukung transparansi informasi hanya terletak pada SDM dan jaringan internet dimana koneksi internet terkadang kurang bagus sehingga kegiatan publikasi yang dilakukan terkadang tidak lancar.

¹⁴ Hasil wawancara dengan keempat informan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Sedangkan faktor pendukungnya yaitu tersedianya jaringan internet serta sarana dan prasarana yang memadai.

Referensi

- Anonim. (2017). *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Budianto, H & Hamid, F (ed). (2011). *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Kencana
- Dadan. (2012) *Kreatif Membuat Website Profesional Tanpa Ribet, Tanpa Biaya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Indrajit, R. E. (2006). *Elektronik Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Suaedi, F. & Wardiyanto, B. (Ed). (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi Dan E-Governance* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yohana, N., Yazid, T.P., Wirman, W. (2017). *Pengelolaan Website Sebagai E-Government Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakat*. Diperoleh dari <http://Repository.unri.ac.id/> , (diakses 26 November 2017).